

REVOLUSI DALAM PERSPEKTIF SEJARAH

Oleh : Zulkarnain, M.Pd

Tuntutan revolusi kian nyaring terdengar di mana-mana, juga dengan kian terpuruknya kehidupan wong cilik. Revolusi dapat diyakini menjadi jalan untuk melakukan lompatan sejarah peradaban suatu bangsa. Revolusi memang penting, tetapi yang lebih penting adalah konsep rekonstruksi dan restrukturisasinya yang harus jelas dan terukur dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat yang kompleks oleh karenanya revolusi bukan pekerjaan individual tetapi pekerjaan kolektif seluruh komponen bangsa

Penyelidikan-penyelidikan akademis tentang revolusi berusaha untuk mendapat semacam tatanan mengenai masa yang pada dasarnya kacau balau. Mengenai orang-orang Indonesia yang mendukung revolusi, maka ditarik perbedaan-perbedaan antara kekuatan-kekuatan perjuangan bersenjata dan diplomasi mereka yang mendukung dan menentang revolusi sosial, generasi muda dan generasi tua, golongan kiri dan golongan kanan, kekuatan Islam dan kekuatan sekuler, dan sebagainya. Dengan kata lain, sebuah revolusi bisa menghasilkan kemungkinan-kemungkinan kontradiktif dan mewarnai proses perjalanan bangsa Indonesia

1. Makna Sebuah Revolusi

Sejarah akan selalu mewarnai kehidupan seseorang. Dimensi ruang dan waktu, serta adanya suatu unsur perubahan menjadi sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kadangkala perubahan tersebut bersifat konstruktif, akan tetapi suatu saat menjadi sebaliknya yaitu bersifat destruktif. Akibatnya, sejarah menjadi sebuah memori yang berbeda dalam penafsiran setiap individu walaupun konteks permasalahannya sama.

Di samping itu situasi yang kompleks tersebut dapat ditinjau pula dari segi insiden-insiden dan urutan-urutan insiden yang menentukan hubungan sebab-akibat, antara lain faktor-faktor variabel ekonomi, sosial, politik, atau keagamaan. Arti penting yang harus diberikan pada suatu faktor kausal tertentu atau determinan dan gerakan sosial tersebut.¹

Kontak kebudayaan mengakibatkan perubahan institusional yang dinamis, juga menimbulkan destrukturalisasi dan diferensiasi norma-norma, nilai-nilai, dan simbol-simbol. Analisisnya harus mencakup pula unsur-unsur yang esensial dari gerakan sosial seperti tujuan-tujuan ideologi, kohesi golongan, organisasi, dan taktik. Dan akhirnya, transformasi politik yang terjadi selama abad ke-19 dianalisis menurut segi; peraihan dari otoritas tradisional ke otoritas legal rasional, dan penyelenggaraan otoritas kharismatik gerakan itu sendiri.² Perkembangan sejarah yang tampak dalam dinamika masyarakat muncul karena adanya kekuatan-kekuatan sejarah berupa kekuatan alam (misalnya sumber-sumber ekonomis), pertumbuhan penduduk, kepentingan-kepentingan sebuah kelas, grup dan individu, penemuan teknologi baru, ideologi, kepercayaan, pengaruh-pengaruh dari luar, dan sebagainya.³

Abad ke-19 adalah periode pergolakan atau revolusi sosial yang menyertai terjadinya perubahan sosial sebagai akibat dari pengaruh kuat

¹ . Sartono Kartodirdjo, *Pemberontakan Petani Banten 1888; Koradisi, Jalan, dan Kelanjutannya, Sebuah Studi, Kasus Mengenai Gerakan Sosial di Indonesia*, terj. Hasan Basri, Jakarta: Pustaka Jaya, 1984, hlm. 24.

² . Ibid., hlm. 42.

³ . Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wahana, 2003, hlm. 46.

kolonialisme Barat. Tergusurnya keseimbangan larva masyarakat tradisional tentu saja menimbulkan rasa frustrasi dan tersingkir yang umum, dan jika perasaan-perasaan itu dikomunikasikan maka akan berkembang menjadi keresahan dan kegelisahan yang meluas. Keadaan seperti itu bisa meledak jika difokuskan di bawah satu pemimpin yang mampu mengarahkan potensi agresif itu pada sasaran-sasaran tertentu yang dianggap bermusuhan atau menuju perwujudan gagasan-gagasaan tentang milenari.⁴

Persoalan sebenarnya adalah apa yang akan dilakukan oleh kekuatan revolusioner setelah revolusi menentukan momentumnya dengan pergantian kekuasaan? Pengalaman kita menunjukkan bahwa revolusi tidak memiliki basis ideologi dan konsep rekonstruksi serta restrukturisasi yang jelas. Akibatnya, ketika kekuasaan politik jatuh maka kekuatan revolusioner justru terjebak dalam tindakan membagi-bagi kekuasaan, lalu mereka saling bertikai. Kemudian yang berhasil berkuasa justru berusaha mengukuhkan kekuasaannya dengan berbagai cara. Kekuatan revolusioner pun terpecah dan tercabik-cabik oleh nafsu kekuasaan yang tidak pernah merasa puas.⁵ Akibatnya, tujuan dan cita-cita dari sebuah revolusi menjadi bias karena banyaknya kepentingan yang beredar.

Secara umum sudah diketahui bahwa gerakan-gerakan sosial sebagai suatu proses merupakan hal yang sangat kompleks. Pendekatannya bisa dilakukan melalui berbagai jalur metodologis atau perspektif teoretis, dan yang terpenting adalah jalan atau perspektif ekonomis, sosiologis, politikologis, dan kultural-antropologis. Untuk tujuan-tujuan analitis maka sejumlah aspek dari fenomena-fenomena yang kompleks itu dapat diisolasi walaupun harus dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan distorsi dalam konteks yang bersangkutan. Kita dapat mengandaikan bahwa pertemuan beberapa faktor telah menyebabkan terjadinya peristiwa sejarah.

⁴ . Kartodirdjo, op.at., hlm_15.

⁵ . Lihat pengantar Musa Asy'arie dalam Sarbini, *Islam di Tepian Reivolusi; Ideologi Pemikiran dan Gerakan*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005, hlm xi.

Sebelum mencapai titik pertemuan, maka faktor-faktor tersebut mengalami perkembangannya sendiri berdasarkan perimbangan teoretis.⁶

Berpikir sejarah mengharuskan kita mempertemukan dua pandangan yang saling bertentangan: *pertama*, cara berpikir yang kita gunakan selama ini adalah warisan yang tidak dapat disingkirkan, *kedua* jika kita tidak berusaha menyingkirkan warisan itu, maka kita harus menggunakan presentisme yang melihat masa lalu dengan kaca mata sekarang.⁷ Dalam konteks pemahaman terhadap istilah “revolusi”, maka kita harus dapat memadukan kedua pandangan tersebut.

Dengan demikian tampak bahwa istilah “revolusi” dan “revolusi Indonesia” telah mengalami pasang surut dalam pemaknaannya di dalam masyarakat kita. Pada masa kemerdekaan 1945-1949, istilah “revolusi” dan “revolusi Indonesia” dipergunakan secara luas untuk menyebut perjuangan dan pergolakan pada masa itu. Revolusi yang menjadi alat tercapainya kemerdekaan bukan hanya merupakan kisah sentral dalam sejarah Indonesia, melainkan unsur yang sangat kuat dalam persepsi bangsa Indonesia tentang dirinya sendiri. Semua usaha yang tidak menentu untuk mencari identitas-identitas baru dan tatanan sosial yang lebih adil kemudian tampak membuahkan hasil pada masa-masa sesudah Perang Dunia II.⁸

Patut diingat bahwa dalam hubungan ini proses sekularisasi dan modernisasi sudah berlangsung pada saat munculnya kebangkitan gerakan nasionalis Indonesia dan pecahnya revolusi Indonesia. Apabila perbedaan itu dilihat bukan dalam aspek fungsionalnya melainkan dalam aspek rasionalitasnya, maka kita dapat menyingkapkan perbedaan-perbedaan esensial antara harapan-harapan mesianik dan ideologi nasional dalam doktrin-doktrin politik.⁹ Di sisi lain, konstitusi yang berlaku tidak mampu memenuhi tuntutan perubahan cepat yang kompleks sehingga penguasa yang muncul

⁶ . Kartodirdjo, op.dt., hlm. 24.

⁷ . Sam Wineburg, *Berpikir Historis: Memetakan Masa Depan, Mengajarkan Masa Lalu*, terj. Masri Maris, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006. hlm. 17-18.

⁸ . M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, terj. Satrio Wahono, dkk., Jakarta: Serambi, 2005, hlm. 428.

⁹ . Kartodirdjo, op.dt., hlm. 20-21

cenderung ingin terus berkuasa dan menjadikan konstitusi sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaannya. Revolusi seakan-akan mati suri karena tidak ditopang oleh konstitusi yang memadai guna memenuhi tuntutan perubahan cepat yang kompleks sehingga budaya dan konflik politik hanya berorientasi pada kekuasaan.¹⁰

Dan sudut pandang Islam klasik, revolusi memiliki konotasi buruk yaitu menggulingkan tatanan yang didirikan oleh orang beriman. Istilah tersebut sering digunakan untuk merujuk revolusi yang berarti (1) *fitnah* (godaan, hasutan, perselisihan menentang Allah); (2) *ma'siyah* (ketidakpatuhan, pembangkangan, perlawanan, pemberontakan); (3) *riddah* (berpaling atau memungungi). Dalam perkembangan berikutnya, revolusi dimaknai sebagai pemberontakan terhadap Islam, yang mereka beri nama *kharij* (*jamak* dari *khawarij*) yang berarti keluar. Sedangkan dalam wacana Islam kontemporer yang mendasarkan pada ilmu-ilmu sosial, revolusi dimaknai sebagai pemberontakan menentang otoritas yang terpilih. Istilah modern untuk revolusi dalam bahasa Arab adalah *tsaurah* yang makna akar katanya berarti menghamburkan debu.¹¹ Namun demikian secara umum revolusi diartikan sebagai perubahan yang cepat pada budaya politik yang ada.

Dalam teori revolusi, Karl Marx mengatakan bahwa perkembangan masyarakat di tingkat kekuatan produksi material masyarakat berada dalam pertentangan dengan keberadaan hubungan produksi di tempat mereka bekerja. Bentuk perkembangan kekuatan produksi itu lantas berubah menjadi pengekangan (penindasan). Konflik antara kekuatan produksi baru dengan hubungan produksi lama itulah yang menjadi gerakan revolusi.¹² Marx mengasumsikan bahwa kapitalisme akan memunculkan kesejahteraan dan penderitaan. Kesejahteraan dalam kelas borjuis semakin mengecil dan penderitaan dalam kelas buruh kian membesar. Ketegangan antara borjuis dan proletariat akan mendorong kaum proletariat untuk bersatu dan sadar-kelas.

¹⁰ . Sarbini, loc cit.

¹¹ . Ibid, him 23.

¹² . Ibid., hlm. 161

Ketegangan tersebut lantas mengarah pada revolusi yang disebut “revolusi sosial”.¹³

Revolusi memang mempunyai makna sentral bagi persepsi bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, peristiwa-peristiwa yang terjadi pada periode 1945-1949 merupakan revolusi yang dipandang sebagai manifestasi tertinggi dari tekad nasional, lambang kemandirian suatu bangsa, dan bagi mereka yang terlibat di dalamnya maka revolusi adalah pengalaman emosional luar biasa dengan rakyat yang berpartisipasi langsung.¹⁴ Ada sebuah kenangan yang tak terlupakan di benak bangsa Indonesia akan suka duka pada masa revolusi tahun 1945-1949 tersebut.

Penyelidikan-penyelidikan akademis tentang revolusi berusaha untuk mendapat semacam tatanan mengenai masa yang pada dasarnya kacau balau. Mengenai orang-orang Indonesia yang mendukung revolusi, maka ditarik perbedaan-perbedaan antara kekuatan-kekuatan perjuangan bersenjata dan diplomasi mereka yang mendukung dan menentang revolusi sosial, generasi muda dan generasi tua, golongan kiri dan golongan kanan, kekuatan Islam dan kekuatan sekuler, dan sebagainya.¹⁵ Dengan kata lain, sebuah revolusi bisa menghasilkan kemungkinan-kemungkinan kontradiktif dan mewarnai proses revolusi tersebut.

Bahkan bagi para ahli sejarah Indonesia modern, revolusi memainkan peranan yang simbolik sebagai wadah beragam pandangan mengenai masa lampau, masa kini, dan masa depan bangsa ini. Beberapa ahli sejarah yang memandang revolusi sebagai produk alami dan lamanya kekuasaan kolonial dan perlawanan kekuasaan yang terorganisasi sebelum Perang Dunia II menganggap revolusi sebagai perjuangan kemerdekaan. Para ahli sejarah itu, dengan rasa simpati, bahkan memusatkan perhatiannya pada para pemimpin kebangsaan yang lebih tua.¹⁶

¹³ . Ibid., him. 168

¹⁴ . J.D. Legge, *Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan; Peranan Kelompok Sutan Sjahrir*. terj. Hasan Basri, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1993, hlm. 1-2

¹⁵ . Op.dt., him. 423-429.

¹⁶ . Legge, op dt., him. 1-2

Para penulis lebih mencurahkan perhatian pada peneliti terhadap aliran-aliran ideologi di dalam revolusi, misalnya nasionalis, sosial-demokrat, komunis, dan Islam. Mereka juga mempelajari pergeseran kekuasaan yang menyertai perjuangan ini, atau mengkaji kemungkinan-kemungkinan yang muncul untuk perubahan-perubahan sosial yang mendasar. Sedangkan penulis lain justru mengamati jalannya peristiwa-peristiwa di tingkat lokal dan mengkaji cara agar isu-isu nasional bisa terjalin dengan tekanan-tekanan dari keadaan lokal.¹⁷

Gagasan-gagasan revolusi akhir-akhir ini terus muncul akibat dari gagalnya kaum reformis dalam menata bangsa dan negaranya. Untuk menjembatani hal tersebut maka kita tentu tidak ingin menggagas sebuah revolusi tanpa perhitungan yang matang agar dapat menghindarkan diri dari revolusi dengan stigma politik yang penuh darah serta hilangnya nyawa seperti dalam Revolusi Prancis dan Revolusi Rusia.

Revolusi adalah perubahan radikal dan fundamental dalam tata kehidupan secara cepat. Umumnya, revolusi ditandai dengan penggulingan kekuasaan dan sering berdaah-darah akibat konflik kekerasan yang ditimbulkan antara dua kekuatan yang bertahan dan berusaha saling menjatuhkan. Dari sejarah, kita tahu bahwa tanpa revolusi maka dinamika masyarakat akan berjalan lamban. Juga tidak akan ada loncatan historis guna membangun peradaban baru dalam aspek sosial, ekonomi, politik, hukum, kebudayaan, sains dan teknologi, serta keagamaan.¹⁸

Perbedaan paham bahwa suatu “revolusi belum selesai” atau “revolusi sudah selesai” pernah mewarnai perkembangan sejarah revolusi tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari perbedaan pendapat dan pemikiran antara Soekarno dan Muhammad Hatta. Ini bukan sekedar pemaknaan terhadap faham tentang proses revolusi namun justru secara lebih jauh melihat implikasi yang diakibatkannya. Revolusi bukanlah sekedar slogan atau propaganda politik, tetapi sebuah doktrin politik jika yang mengucapkannya adalah seorang

¹⁷ . Ibid.

¹⁸ . Sarbini, *op.cit*, hlm.xi

pemimpin (presiden) yang mempunyai kekuasaan. Hal itu pula yang pernah diungkapkan oleh Soekarno. Selaku presiden yang mendoktrin bahwa “revolusi belum selesai” maka sangat mungkin segala tindakan yang diambil, walaupun ternyata menerobos aturan-aturan hukum, dapat dibenarkan. Sedangkan Muhammad Hatta sendiri lebih berpegang pada fahan “revolusi sudah selesai” dalam menilai kebijakan-kebijakannya.

2. Revolusi Menurut Pemikiran Soekarno

Soekarno bagi bangsa Indonesia adalah salah satu sosok pahlawan revolusi yang mempunyai peranan dan pemikiran yang bervisi jauh ke depan. Ide-idenya selalu dilontarkan dalam berbagai forum dengan penuh kharisma kepemimpinan. Pemikirannya tentang jalannya revolusi juga mempunyai pengaruh yang besar bagi bangsa Indonesia. Bahkan Bung Karno selalu menegaskan, hingga di ujung akhir kekuasaannya, bahwa “revolusi belum selesai”. Ia pernah mengatakan bahwa revolusi tidak akan pernah berhasil jika dipimpin oleh ahli hukum, segala perubahan yang seharusnya cepat diambil tidak akan terlaksana karena ahli hukum itu akan banyak berkuat dengan persoalan keabsahan (legalitas) sehingga kita akan dikenang sebagai generasi peragu.

Bung Karno kemudian membagi tingkatan-tingkatan revolusi. Tahun 1945-1955, menurutnya, adalah tingkat *physical revolution*. Dalam tingkatan ini Indonesia berada dalam fase merebut dan mempertahankan proklamasi kemerdekaan dari tangan imperialis dengan mengorbankan darah. Periode 1945-1950 adalah periode revolusi fisik. Lalu tahun 1950-1955 merupakan tahun-tahun untuk bertahan hidup atau tingkatan survival. Survival berarti tetap hidup, tidak mati. Walaupun mengalami lima tahun revolusi fisik (*physical revolution*), Indonesia tetap berdiri. Karena itu, tahun 1950-1955 adalah tahun penyembuhan luka-luka, tahun untuk menebus segala penderitaan yang dialami dalam revolusi fisik. Tahun 1956 adalah periode revolusi sosial-ekonomi untuk mencapai tujuan terakhir revolusi yaitu suatu

masyarakat yang adil makmur “tata-tentrem-karta-raharja”.¹⁹ Tepatnya, periode tahun 1955-sekarang (dan seterusnya) adalah periode *investment*, yaitu *investment of human skill, material investment, mental investment*. Investment-investment itu semuanya adalah untuk *socialist construction* yaitu untuk amanat penderitaan rakyat.²⁰

Revolusi nasional merupakan upaya mendobrak segala belenggu kapitalisme, hukum-hukum penjajah, dalam arti destruktif, akan tetapi simultan dengan itu, tenaga-tenaga konstruktif bekerja, menggembelng dan membangun negara baru, pemerintah baru, hukum-hukum baru, alat-alat produksi baru, dan lain-lain yang serba baru. Sementara itu, juga dipersiapkan berangsur-angsur, syarat untuk berlakunya revolusi sosial. Revolusi nasional tidak bisa berbarengan sekaligus dengan revolusi sosial. Revolusi nasional yang merupakan tugas sejarah harus selesai terlebih dahulu sebelum diganti oleh face revolusi social. Berapa lama pergantian itu?²¹

Bung Kamo tidak bisa menjawab pasti lamanya waktu, karena hal itu bukanlah pekerjaan kecil. Ia menegaskan, jangankan yang berkesejahteraan sosial, menyusun masyarakat yang normal saja tidak mungkin sebelum selesainya soal-soal nasional. Jadi waktunya bisa bertahun-tahun atau berpuluh-puluh tahun, tapi yang jelas bukan hitungan bulan. Revolusi Perancis, misalnya, berlangsung selama 80 tahun, dan Revolusi Rusia berlangsung selarna 40 tahun. Singkatnya, pergerakan menuju revolusi sosial bukan pergerakan kecil-kecilan. Pergerakan itu bermaksud untuk mengubah sikap masyarakat sesuai dengan tujuannya yaitu suatu masyarakat yang adil dan makmur. Bagi Bung Karno, revolusi sosial adalah proses menuju suatu masyarakat Indonesia tanpa kapitalisme. Bung Karno ingin menggunakan

¹⁹ . Wawan Tunggul Alam, *Demi Bangraku Pertentangan Sukarno Vs. Hatta*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 461-462.

²⁰ . Departemen Penerangan RI, *Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi dengan Tambahan Re-So-Pim Tahun Kemenangan Genta Suara Revolusi*, Surabaya: Pertjetakan Negara dan Pers Nasional, 1963, hlm. 158. Tunggul Alam, op cit, hlm_ 462

²¹ . Tunggul Alam, op cit, hlm_ 462

revolusi sosial untuk mengakhiri kapitalisme. Dan selanjutnya, dengan alat revolusi pula mencapai cita-cita kemerdekaan.²²

Menurut Bung Karno, revolusi belum selesai, dan masih berjalan terus, terus, dan sekali lagi terus. Logika revolusioner adalah sekali kira mencetuskan revolusi, kita harus meneruskan revolusi itu, sampai segala cita-citanya terlaksana. Ini secara mutlak merupakan hukum revolusi, yang tidak dapat dielakan lagi, dan tidak dapat ditawar-tawar lagi. Karena itu, jangan berkata bahwa “revolusi sudah selesai” padahal revolusi sedang berjalan, dan jangan mencoba membendung atau menentang atau menghambat suatu fase revolusi, padahal fase itu merupakan kelanjutan daripada revolusi.²³

Selain itu, Bung Karno juga sangat terkenal dengan pernyataan-pernyataannya yang berkaitan dengan semangat revolusi melalui berbagai pidato, di antaranya adalah sebagai berikut:²⁴

Hayo, bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri mari berjalan terus! Jangan berhenti. Revolusimu belum selesai! Jangan berhenti. Sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli ia dari bangsa apa pun, ia akan digiling digilas oleh sejarah itu sama sekali. Kalau pihak Belanda menentangnya, dengan misalnya tidak mau menyudahi kolonialismenya di Irian Barat, satu hari akan datang, entah esok, entah lusa, yang ia pasti digiling digilas oleh sejarah. Tetapi sebaliknya pun, kalau engkau menentangnya, engkau pun akan digiling digilas oleh sejarah. (Pidato Proklamasi 17 Agustus 1951)

Those three, then are the essentials of true national revolution. First, national independence; second, national ideology; third a national leadership. (Pidato di Los Angeles, 1961)

Kita merombak, tetapi kita juga membangun! Kita membangun, dan untuk itu kita merombak. Kita membongkar, kita mencabut, kita menjebol! Semua itu untuk dapat membangun revolusi adalah “build tomorrow” dan “reject yesterday”. Revolusi adalah “construct tomorrow” dan “pull down yesterday”. Hakekat revolusi adalah perombakan, penjebolan, penghancuran, pembinasaan dari semua apa yang kita sukai. Revolusi adalah perang melawan keadaan yang memicu untuk melahirkan keadaan yang baru. (Pidato Proklamasi 17 Agustus 1960)

²² . Ibid

²³ . Departemen Penerangan RI, op.cit, h1m. 162

²⁴ . Tunggul Alam, op.cit., hlm. 124-125

3. Revolusi Menurut Pemikiran Muhammad Hatta

Muhammad Hatta adalah sosok pahlawan revolusi yang mempunyai peranan dan pemikiran yang konstruktif bagi bangsa Indonesia. Sebagai seorang wakil presiden pada masanya, Bung Hatta mencetuskan ide-ide yang sangat berpengaruh bagi bangsa Indonesia dalam upaya menggelorakan semangat revolusi. Namun pemikiran Bung Hatta tentang revolusi sering berseberangan dengan Bung Karno selaku presiden pada waktu itu. Bung Hatta mempunyai prinsip bahwa “revolusi sudah selesai”. Sangat kontras dengan prinsip Bung Karno bahwa “revolusi belum selesai”.

Di dalam pidatonya, berkenaan dengan penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa oleh Universitas Gadjah Mada, Muhammad Hatta antara lain memberikan analisis singkat mengenai revolusi pada umumnya dan revolusi Indonesia pada khususnya. Menurut Bung Hatta :

*... suatu analisis yang mendalam akan menunjukkan bahwa segala pemberontakan dan perpecahan, anarki politik avontuisme, serta tindakan-tindakan ekonomi yang mengacaukan, adalah akibat daripada revolusi nasional yang tidak dibendung pada waktu yang tepat. Salah benar orang mengatakan, bahwa revolusi nasional kita belum selesai Revolusi adalah letusan. masyarakat sekonyong-konyong yang melaksanakan unwehrtung alter wehrte. Revolusi mengguncangkan lantai dan sendi, pasak dan tiang jadi longgar semuanya, sebab itu, saat revolusi itu tidak dapat berlaku lama, tidak lebih dari beberapa minggu atau beberapa bulan. Sesudah itu harus dibendung, datang masa konsolidasi untuk merealisasi hasil daripada revolusi itu. Yang belum selesai bukanlah revolusi itu, melainkan usaha menyelenggarakan cita-cita di dalam waktu, setelah fondamen dihentikan. Revolusi itu sendiri sebentar saatnya, masa revolusioner dalam konsolidasi dapat berjalan lama, sampai berpuluh-puluh tahun. Demikian dengan Revolusi Perancis, demikian dengan Revolusi Rusia, demikian dengan Revolusi Kemalis (Turki) dan lain-lainnya. Tak mungkin revolusi berjalan terlalu lama, sebab apabila tidak dibendung dalam waktu yang tepat, pasak dan tiang yang jadi longgar tadi terus berantakan. Sementara itu, anasir-anasir baru memasukinya, mengambil keuntungan dari situ, dan antara merdeka dan anarki, tidak terang lagi batasnya...*²⁵

²⁵ . Pidato Muhammad Hatta yang berjudul “Lampau dan Datang” diucapkan pada penerimaan gelar Doctor Honoris Causa oleh Universitas Gadjah Mada pada 27 November 1956. Lihat

Salah satu contoh paling kongkret perbedaan paham antara Bung Karno dengan “revolusi belum selesai” dan Bung Hatta dengan “revolusi sudah selesai” adalah dalam sikapnya terhadap upaya nasionalisasi perusahaan asing (Belanda) di Indonesia setelah kemerdekaan. Bung Karno menghendaki perusahaan-perusahaan Belanda yang dianggapnya sebagai alat kapitalisme asing itu dinasionalisasikan atau diambil-alih bangsanya tanpa ganti rugi, (disita) menjadi milik republik. Menurutnya, pengambilalihan seperti itu lumrah saja dalam sebuah revolusi. Dan nasionalisasi perusahaan Belanda itu diperlukan guna membangun negara.

Bung Hatta justru tidak sependapat. Menurutnya, jika dinasionalisasikan dengan cara sita begitu saja, maka kemerdekaan bangsa Indonesia tidak akan tercapai, karena kita hidup di tengah dunia yang dilingkari oleh negara-negara imperialis dan kapitalis. Oleh karena itu jika kita ingin menasionalisasi perusahaan-perusahaan tersebut maka kita harus memberi ganti rugi, lalu dengan apa kita bisa menggantinya, sementara keuangan negara pada saat itu sedang tekor.²⁶

Pandangan Bung Hatta ini jelas dilandasi oleh pemahannya bahwa “revolusi sudah selesai”. Hal itu kembali ditegaskan dalam bukunya, *Lampau dan Datang* (1956). Menurutnya, revolusi telah memuncak dengan penyerahan kedaulatan pada akhir 1949 (saat ditandatanganinya Konferensi Dimeja Bundar). Bung Hatta bahkan menyindir Bung Karno di buku tersebut (meskipun tidak menyebut namanya). Bung Hatta juga memberi contoh Revolusi Perancis, Revolusi Rusia, dan Revolusi Turki²⁷

Bung Hatta menilai bahwa segala pemberontakan, anarki politik, avonturisme, serta tindakan ekonomi yang mengacaukan yang terjadi di Republik Indonesia merupakan akibat dan revolusi yang tidak dibendung pada waktu yang tepat. Apabila revolusi tidak dibendung pada waktu yang tepat,

Nugroho Norosusanto, *Proklamari dan Revolusi*, Jakarta: Panitia Peringatan Ulang Tahun Bung Hatta Ke-70, 1972, hlm. 289.

²⁶ . *Ibid.*, hlm. 463.

²⁷ . Deliar Noer, *Muhammad Hatta; Biografi Politik*. Jakarta: LP3ES, 1950, hlm.490-491

maka pasak dan bang jadi longgar tadi terus berantakan dan akhirnya seluruh bangunan ikut berantakan. Sementara itu, anasir-anasir baru memasukinya, mengambil keuntungan dari situ. Dan di antara merdeka dan anarki, tidak terang lagi batasnya. Karena itu Bung Hatta menegaskan bahwa “revolusi sudah selesai”.²⁸

4. Revolusi Menurut Pemikiran Sjahrir

Sjahrir, dalam pandangan George McTurnan Kahin, merupakan tokoh yang berpengaruh di hari-hari menjelang proklamasi kemerdekaan dan sesudahnya. Ia adalah arsitek terjadinya pergeseran sistem di bulan November 1945, yaitu dari sistem presidensial sebagaimana ditetapkan dalam UUD yang pertama menjadi sistem parlementer. Suatu pergeseran yang dicapai bukan melalui perubahan UUD melainkan dengan diterimanya konvensi yang menyatakan UUD akan berjalan di dalam sistem parlementer. Kemudian selaku perdana menteri, Sjahrir adalah orang yang bertanggung jawab mengemudikan republik yang masih sangat muda ini dalam melewati bahaya yang mengelilinginya, dan ia berhasil meraih suatu tingkat pengakuan dan dunia luar bagi republik.²⁹

Sifat strategi Sjahrir sebagian terungkap dalam responnya terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Agustus 1945, dan sebagian dalam manuver-manuver politik berikutnya yang menempatkan dirinya pada kedudukan sebagai perdana menteri, juga dalam cara ketika pemerintahannya mendapatkan tekanan-tekanan dari dalam dan luar negeri. Sejumlah asas pedoman dapat kita lihat dalam tindakan-tindakannya selama periode itu, di antaranya ada yang merupakan perpanjangan atau evolusi pandangan itu dalam rangka situasi yang berkembang.

Pertama, yang penting baginya adalah bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia harus berada anti-fasis. Itu merupakan konsekuensi perspektif yang sudah ia kembangkan mengenai arah perkembangan peristiwa-peristiwa di dunia pada dasawarsa 1930-an. Pembebasan Indonesia dan perkembangannya

²⁸ . Tunggul Alam, op.cit., hlm. 464.

²⁹ . Legge, op.cit. hlm. 7

sebagai sebuah negara republik yang demokratis dan sosialis mendapatkan tempat dalam perspektif tersebut. Kedua, kesadaran akan potensi otoriter yang terkandung dalam proses revolusi. Dengan memperhitungkan ketidakjelasan situasi dan kemungkinan terjadinya kekacauan setelah kekalahan Jepang maka Sjahrir menginginkan agar kemerdekaan diproklamasikan setertib mungkin dan melalui apa yang dapat dianggap sebagai suatu otoritas Indonesia yang terbentuk sebagaimana mestinya.³⁰

Ada dua prinsip yang saling berseberangan dalam menyikapi perbedaan penilaian terhadap kegiatan Sjahrir, Soekarno, dan Hatta semasa pendudukan Jepang. Kegiatan aksi Sjahrir dilakukan secara diam-diam sambil terus berhubungan dengan para pemimpin yang lebih tua dan terkemuka, terutama dengan memusatkan kegiatannya pada upaya membangun gerakan perlawanan bawah tanah yang menentang penguasa Jepang. Sedangkan Soekarno Hatta memakai jalan kerja sama secara terbuka dengan pemerintah pendudukan Jepang, dan sedapat mungkin memperlunak perlakuan Jepang. Bahkan, bila dimungkinkan, memanfaatkan jabatan resmi mereka di bawah kekuasaan Jepang untuk membela perjuangan kebangsaan."³¹

Pada akhir Oktober 1946, Sjahrir menerbitkan buklet kecil, *Perjuangan Kita*, yang disebarakan selama hari-hari pertama bulan November. Buklet ini sangat mempengaruhi pemikiran politik di Indonesia, terutama di kalangan buruh yang dulu ikut gerakan bawah tanah, juga di kalangan pemuda berpendidikan. Dalam buklet ini ia menyerukan para pemuda untuk bertindak dengan penuh tanggung jawab, berjuang dengan segenap jiwa revolusionernya, terutama menghindari kekerasan anti-asing dan anti-Indo, dan mengerahkan kekuatan mereka ke arah pembentukan suatu pemerintah yang demokratis, non-fasis serta non-feodalistis.³²

Orang Indonesia harus membedakan aspek bagian luar dari revolusi mereka, yaitu nasionalisme, dan aspek sosial yang merupakan bagian

³⁰ . Ibid, hlm.168.

³¹ . Ibid, hlm. 5

³² . George McTurnan Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*, terj. Nin Bakdi Soemanto, Surakarta: UNS Press dan Pustaka Sinar Harapan, 1955, hlm. 207.

dalamnya. Ada bahaya besar jika dalam memusatkan aspek nasionalisme, revolusi itu berdasarkan demokrasi, maka aspek sosial bagian dalam itu akan dilupakan. Dengan melihat warisan feodal yang terus hidup dengan kuat, maka penyerapan aspek nasionalistis untuk menghilangkan aspek demokrasi internal yang akan menggiring ke arah fasisme adalah feodalisme dan supernasionalisme. Yang harus ditekankan dan menjadi tujuan utama revolusi Indonesia bukanlah nasionalisme, tetapi demokrasi.³³

Akhirnya, Sjahrir menyerukan agar rakyat Indonesia menolak semua pimpinan yang pernah aktif berkolaborasi dengan Jepang atau Belanda, dan mempercayakan kepemimpinan revolusi hanya kepada mereka yang tidak ternoda oleh hubungan semacam itu dari tujuan akhirnya adalah demokrasi. Ia menyatakan:

Revolusi kita harus dipimpin oleh kelompok-kelompok demokratis yang revolusioner, dan bukan oleh kelompok-kelompok yang pernah menjadi antek-antek fasis, fasis kolonial, atau fasis militer Jepang.

Perjuangan demokrasi revolusioner itu dimulai dengan membersihkan diri dari soda-soda fasis Jepang, mengungkung pandangan orang-orang yang jiwanya masih termakan oleh pengaruh propaganda Jepang dan didikan Jepang. Orang-orang yang telah menjual jiwa dan kehormatannya kepada fasis Jepang harus disingkirkan dari kepemimpinan revolusi kita, yaitu orang-orang yang pernah bekerja dalam organisasi propaganda Jepang, polisi rahasia Jepang, umumnya dalam usaha pasukan kelima Jepang. Semua orang ini harus dianggap sebagai pengkhianat perjuangan dan harus dibedakan dari kaum buruh biasa yang bekerja hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, semua kolaborator politik dengan fasis Jepang seperti yang disebutkan di atas harus dianggap sebagai fasis sendiri atau alat dan kaki tangan Jepang, yang sudah tentu berdosa dan berkhianat kepada perjuangan revolusi rakyat.³⁴

Ada banyak definisi mengenai revolusi, namun semua definisi itu mengandung unsur perubahan besar yang menyangkut negara. Ada yang mengandung unsur paksaan (*force*), unsur kekerasan (*violence*), dan ada

³³ . Ibid, hlm 207-208.

³⁴ . Untuk pernyataan Soetan Sjahrir ini lihat Kahin, *ibid.*, hlm. 207

yang tidak selalu mengandung unsur-unsur tersebut. Definisi yang paling sederhana adalah: “*A change brought about not necessarily by force and violence, whereby one system of teoality is terminated and another originated*” (perubahan yang diadakan tidak selalu dengan paksaan dan kekerasan, yang mengakhiri suatu sistem legalitas yang satu, dan yang membentuk suatu sistem legalitas yang lain).³⁵

Meskipun sedikit berbeda dengan definisi di atas, namun definisi berikut ini mungkin lebih mendekati kenyataan: “*revolutions are forcible interventions, either to replace government, or to change the processes of government* “ (revolusi adalah tindakan memaksa untuk mengganti pemerintah ataupun untuk mengganti proses-proses pemerintahan).³⁶

Dengan menggunakan definisi tersebut, maka apa yang terjadi pada 17 Agustus 1945 jelas merupakan suatu revclusi. Karena pada saat itu suatu sistem legalitas yang satu diganti dengan sistem legalitas yang lain, yakni sistem legalitas Kemaharajaan Jepang yang dilaksanakan oleh tentara pendudukannya di Indonesia diganti dengan sistem legalitas Indonesia merdeka, yang sehari kemudian ditegaskan sebagai Republik Indonesia. Atau dengan definisi lainnya, pemerintah yang satu diganti dengan pemerintah yang lain, yakni pemerintah balatentara Dai Nippon diganti dengan pemerintah Republik Indonesia. Caranya ternyata dengan paksaan dan kekerasan karena mendapat hambatan dan kemudian ancaman (di daerah-daerah) dari pihak yang legalitasnya diganti.³⁷

Dengan demikian tampak bahwa dalam kasus revolusi Indonesia, sistem legalitas yang diganti bukan sekadar pemerintah melainkan bentuk kenegaraan di bawah lingkungan Kemaharajaan Jepang dengan negara Republik Indonesia. Pergantian sistem legalitas yang satu dengan yang lain terjadi seketika itu via proklamasi, tanpa adanya vacuum satu hari sebagaimana dikatakan oleh para ahli. Adapun pembukan UUD 1945 yang mneliputi Pancasila sebagai dasar filsafat negara merupakan kelanjutan yang tidak terpisahkan dengan prokamasi. Proklamasi adalah titik kulminasi dari cita-cita

³⁵ . Notosusanto, op.cit., hlm. 292

³⁶ . Peter AR Calvert dalam Nugroho Notosusanto, *ibid*

³⁷ . *Ibid.*, hlm. 292-293

kemerdekaan nasional yang telah hidup di dalam alam pikiran rakyat Indonesia selama berabad-abad dan merupakan nilai di dalam kehidupan nasional serta kehidupan kenegaraan kita dewasa ini. Segala milik nasional kita dewasa ini akan ikut lenyap tanpa adanya kemerdekaan. Oleh karena itulah semboyan utama semasa perang kemerdekaan (komponen fisik-militer dari revolusi Indonesia) adalah "merdeka atau mati". Pada masa sekarang kemerdekaan itu dirasakan sebagai *vanzelfsprekend* (sesuatu yang seolah-olah "dengan sendirinya" ada), apalagi oleh generasi muda yang tidak mengalami masa-masa ketika kemerdekaan itu mendapat ancaman besar yang mungkin menyalakan eksistensinya, andai kata tidak dipertahankan secara mati-matian oleh rakyat bersenjata.³⁸

Menurut Chalmers Johnson, ada enam jenis revolusi yaitu:

- 1) Jacquerie (pemberontakan massal petani)
- 2) Millenarian Rebellion (Jacquerie plus pimpinan kharismatik)
- 3) Anarchistic Rebellion (usaha untuk memulihkan masyarakat yang tercerai berai)
- 4) Facobin-Communist Revolution (revolusi sosial yang seponatan seperti di Perancis dan Rusia)
- 5) Conspiracy Coup d'Etat
- 6) Militarized Mass Insurrection (revolusi nasional dan sosial yang diperlutungkan, yang menggunakan perang gerilya)³⁹

Kategorisasi tersebut belum tentu dapat diterima sepenuhnya. Namun mungkin kita dapat memasukkan Militarized Mass Insurrection untuk menganalisis Revolusi Indonesia.

Ada juga beberapa definisi mengenai sebab-sebab pecahnya suatu revolusi, tetapi pada umumnya dibedakan menjadi sebab jangka pendek dan sebab jangka panjang. Harry Eckstein menyebutkan beberapa di antaranya, yaitu:

³⁸ . *Ibid.* hlm. 298.

³⁹ . Chalmers Johnson dalam Nugroho Notosusanto, *ibid.*, hlm. 293.

- 1) Preconditions (the circumstances that make it possible for the precipitant to produce violence) atau keadaan lingkungan yang memungkinkan pencetus untuk menghasilkan kekerasan.
- 2) Precipitant (an event that actually initiates violence) atau suatu kejadian yang benar-benar menggerakkan kekerasan.⁴⁰

Lalu, Chalmer Johnson mengajukan sebagai sebab-sebab bagi pecahnya revolusi:

- 1) Dysfunctions (conditions that put a social system out of equilibrium) atau kondisi-kondisi yang merusak keseimbangan di dalam suatu sistem sosial.
- 2) Accelerators (of dysfunctions), or triggers (occurrences that catalyze or throw into relief the already existent revolutionary level of dysfunctions They do not of themselves cause revolution, but when they do occur in a system already bearing the necessary of dysfunction... they will provide the sufficient cause of the immediate, following revolution) atau kejadian-kejadian yang mengkatalisasi atau menajamkan tahap revolusioner dari disfungsi. Kejadian-kejadian itu pada dirinya tidak menyebabkan revolusi, tetapi jika terjadi dalam suatu sistem yang telah mencapai tahap yang diperlukan dari disfungsi... maka kejadian-kejadian itu akan menjadi sebab munculnya revolusi yang segera menyusulnya.⁴¹

Dapat kita simpulkan bahwa pada umumnya suatu revolusi muncul karena sebab-sebab jangka panjang dan jangka pendek. Bagi revolusi Indonesia, prakondisi yang merupakan sebab jangka panjangnya adalah:

- 1) Cita-cita kemerdekaan Yang senantiasa hidup di hati rakyat Indonesia dan diperjuangkan melalui cara-cara parlementer modern sejauh keadaan mengizinkan oleh pergerakan nasional Indonesia pada zaman Hindia Belanda dan pada zaman pendudukan Jepang.
- 2) Janji-janji pihak Jepang yang menajamkan segera kemerdekaan bangsa Indonesia.

⁴⁰ . Harry Eckstein dalam *ibid.*, hlm. 293-294

⁴¹ . Chalmers Johnson dalam *ibid.*, hlm. 295

3) Kapitulasi pihak Jepang pada 15 Agustus 1945 yang menyebabkan "power deflation" di pihak kekuasaan Jepang dan "loss of authority" pemerintahan balatentara Jepang di mata rakyat Indonesia.⁴²

Adapun sebab jangka pendek bagi pecahnya revolusi Indonesia adalah proklamasi 17 Agustus 1945. Proklamasi itu memunculkan tindakan-tindakan memaksa terhadap pihak Jepang, melalui kekerasan ataupun tidak, agar mereka menyerahkan kedaulatannya kepada Republik Indonesia. Hal itu tampak jelas jika kita mengikuti peristiwa-peristiwa yang terjadi di seluruh Indonesia setelah proklamasi.⁴³

Menurut Liford Edward, suatu revolusi dapat dianggap berakhir jika telah tercapai suatu persetujuan kerja (working agreement) antara pelbagai pihak yang terlibat di dalam revolusi tersebut. Adanya persetujuan itu akan menghasilkan keseimbangan baru karena prinsip-prinsip utama yang telah ditegaskan oleh revolusi tidak lagi menjadi bahan sengketa.⁴⁴

Bagi revolusi Indonesia, implementasi dan Persetujuan Den Haag sebagai hasil Konferensi Meja Bundar merupakan kompromi besar antara pelbagai pihak yang terlibat di dalamnya, baik kaum republiken, federal, maupun Belanda. Masa sesudahnya yaitu pengakuan kedaulatan 29 Desember 1949, seperti yang diungkapkan oleh Bung Hatta, adalah masa konsolidasi. Dengan demikian jelas kiranya bahwa proklamasi merupakan titik tolak besar di dalam kehidupan nasional kita, garis pemisah tajam antara Zaman penjajahan dan zaman, kemerdekaan, dan merupakan pemicu revolusi Indonesia yang berjalan selama empat tahun lebih dan disusul dengan masa konsolidasi yang hingga kini masih berjalan terus.⁴⁵

Revolusi Indonesia sudah dilakukan dan mendapat reaksi hebat di seluruh pelosok Nusantara. Salah satu simbol revolusioner yang lebih luas serta mengandung persamaan dan persaudaraan adalah cara panggilan "Bung" yang diperkenalkan oleh Soekarno yang segera populer di seluruh Indonesia.

⁴² . Ibid

⁴³ . Ibid

⁴⁴ . Liford Edward dalam *ibid.*, hlm. 298

⁴⁵ . Ibid, hlm. 298-299

Gagasan yang dikandungnya mungkin paling dapat dianggap sebagai sintesis dan "saudara revolusioner", "saudara nasionalis Indonesia", dan "saudara republikan"⁴⁶ Simbol revolusioner tersebut menjadi pemantik gerakan revolusi sosial di berbagai daerah.

Tuntutan revolusi kian nyaring terdengar di mana-mana, juga dengan kian terpuruknya kehidupan wong cilik. Revolusi dapat diyakini menjadi jalan untuk melakukan lompatan sejarah peradaban suatu bangsa. Revolusi memang penting, tetapi yang lebih penting adalah konsep rekonstruksi dan restrukturisasinya yang harus jelas dan terukur dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat yang kompleks, baik sosial, ekonomi, politik, hukum, budaya, maupun agama. Kompleksitasnya memerlukan keteladanan, kecerdasan, kearifan, seluruh komponen bangsa karena revolusi bukan pekerjaan individual tetapi kolektif.⁴⁷

⁴⁶ . Kahin,. Op.cit., hlm. 175

⁴⁷ . Sarbini, op. cit, hlm. xiii

DAFTAR PUSTAKA

1. Deliar Noer, Muhammad Hatta; Biografi Poltik. Jakarta: LP3ES, 1950.
2. Departemen Penerangan RI, Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi dengan Tambahan Re-So-Pim Tahun Kemenangan Genta Suara Revolusi, Surabaya: Pertjetakan Negara dan Pers Nasional
3. George McTurnan Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*, terj. Nin Bakdi Soemanto, Surakarta: UNS Press dan Pustaka Sinar Harapan, 1955.
3. Hatta, Muhamad, Kumpulan Pidato, Jakarta: Inti Ida Ayu Press, 1983
4. J.D. Legge, *Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan; Peranan Kelompok Sutan Sjahrir*. terj. Hasan Basri, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1993.
5. Kartodirdjo, Sartono, *Pemberontakan Petani Banten 1888; Koradisi, Jalan, dan Kelanjutannya, Sebuah Studi, Kasus Mengenai Gerakan Sosial di Indonesia*, terj. Hasan Basri, Jakarta: Pustaka Jaya, .
6. Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wahana, 2003, hlm. 46.
7. Musa Asy'arie dalam Sarbini, *Islam di Tepian Reivolusi; Ideologi Pemikiran dan Gerakan*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005.
8. M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, terj. Satrio Wahono, dkk., Jakarta:
9. Sam Wineburg, *Berpikir Historis: Memetakan Masa Depan, Mengajarkan Masa Lalu*, terj. Masri Maris, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
10. Wawan Tunggul Alam, *Demi Bangraku Pertentangan Sukarno Vs. Hatta*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.